

**Judul** : Pengembangan Bisnis Susah, Tapi Kalau Buat Rakyat Okelah  
**Tanggal** : Sabtu, 10 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Pengembangan Bisnis Susah, Tapi Kalau Buat Rakyat Okelah

SENAYAN tidak permasalahan langkah pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 72,44 triliun untuk menyuntik 12 perusahaan negara. Dana tersebut harus mampu mengangkat perekonomian negara, terutama rakyat yang memang tengah kesusahan akibat pandemi.

"Tentu kita akan melihat tujuan PMN (Penyertaan Modal Negara -red) ini. Apalagi saat ini kan memang kalau untuk pengembangan bisnis memang cukup susah karena situasi lagi sulit. Tapi kalau untuk penguasaan, OK-lah buat rakyat," kata anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto di Jakarta, kemarin.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 72,44 triliun ke Komisi VI untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah. Kucuran dana tersebut menggunakan mekanisme PMN, yang nantinya akan menjadi bagian uang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Komis VI, lanjut Darmadi, tentu akan mendalami lebih dulu permintaan tersebut. Apalagi dana yang diajukan cukup besar, bahkan terbesar dari yang dulu pernah diajukan pemerintah ke DPR. Senayan nantinya akan melakukan kajian untuk memastikan suntikan dana ini bisa menciptakan benefit yang luas bagi masyarakat.

"Kita akan melihat kembali tujuan peruntukannya. Kan tujuan pendiriannya untuk masyarakat luas. Ada *economic value* dan juga *financial value*. Ini jadi kriteria kita untuk menilai apakah ini bermanfaat besar bagi masyarakat," jelasnya.

Selain untuk kepentingan rakyat, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, PMN ini sedapat mungkin bisa menciptakan laba yang ujung-ujungnya bisa memberikan dividen ke negara. Tentu negara punya harapan besar, suntikan dana Rp 72 triliun ini bisa menghasilkan dividen yang sangat memuaskan bagi pemerintah.

"Dikasih Rp 72 triliun kan ujung-ujungnya dividen. Jadi jangan hanya lihat pajaknya saja yang dikasih ke negara, tapi



**Darmadi Durianto**

dividennya dong," harapnya.

Untuk itu, lanjut dia, DPR akan melakukan penilaian terhadap masing-masing perusahaan negara yang akan menerima kucuran dana ini. Salah satunya di perbankan, di mana dua bank pemerintah akan menerima dana PMN.

Pertama, PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Kedua, PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 2 triliun juga untuk meningkatkan modal Tier I dan CAR.

"Kita akan lihat, benar nggak untuk pengembangan bisnis. Jangan sampai nanti minta PMN tapi buat gali lubang tutup lubang. Itu tidak boleh PMN buat itu," jelasnya.

Memang salah satu persoalan yang dialami perbankan selama masa pandemi ini, menurut Darmadi, terkait *good governance* atau tata kelola perbankan. Dikhawatirkan, dana PMN ini untuk membiayai kredit macet yang sebenarnya sudah sehat lagi.

"Nah supaya nggak macet, dikasih lagi supaya bisa bayar bunganya. Itu di BTN banyak itu. Kalau PMN digunakan untuk demikian, tentu tidak boleh. Karena itu tujuannya menjadi sangat penting," tambah dia. ■ KAL